

Jakarta, 18-05-2005, *Kompas* - Pemerintah meminta pihak ConocoPhillips segera melakukan kegiatan eksplorasi lapangan gas di Blok A, Nanggroe Aceh Darussalam, dengan bagi hasil 52 persen untuk pemerintah dan 48 persen untuk kontraktor. Apabila ConocoPhillips mulai mengembangkan lapangan gas Blok A, pada tahun ini diharapkan industri yang ada di Lhok Seumawe bisa mendapatkan pasokan gas alam. Demikian dikemukakan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Kardaya Warnika di Jakarta se usai penandatanganan kesepakatan penjualan gas.

Opsi porsi bagi hasil itu adalah pilihan pemerintah yang diberikan kepada pihak ConocoPhillips untuk menghitung berapa besar harga gas alam yang akan ditawarkan penjual kepada pihak industri. Menurut Kardaya, ConocoPhillips menawarkan harga gas sebesar 3,5 dollar AS per juta british thermal unit (MMBTU). Namun, pihak BP Migas meminta produsen gas bernegosiasi langsung kepada calon pembeli. Kardaya juga mengemukakan, pihak ConocoPhillips meminta jaminan keamanan kepada pemerintah. Sementara itu, jaminan pembelian harus diminta sendiri dari konsumen gas alam, khususnya pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengutarakan, porsi bagi hasil 52:48 diambil dalam rapat kabinet. Dengan demikian, kalau PIM setuju dengan harga yang ditawarkan ConocoPhillips, eksplorasi bisa dilakukan segera. PT PIM aman Menyinggung pasokan gas alam untuk PIM, Kardaya menegaskan akan aman hingga bulan Agustus 2005. Kepastian itu didapat setelah Korea Selatan sepakat menunda pembelian satu kargo dan pemerintah setuju membeli satu kargo. Dengan demikian, kebutuhan empat bulan untuk PIM akan terpenuhi. Sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Ari Purnomo optimistis akan mendapatkan satu kargo gas alam cair di pasar. Bahkan, saat ini sudah ada calon pemasok yang sedang melakukan negosiasi dengan pihak Pertamina. Namun, Ari tidak bersedia merinci berapa pastinya harga satu kargo dan berasal dari mana LNG yang dibeli Pertamina.

"Kami harus hati-hati karena pasokan LNG terbatas. Sebagian besar dari produksi LNG dunia sudah terikat dengan kontrak dan hanya sekitar 10 persen yang dapat dibeli dari pasar spot," ujar Ari. Kepala Divisi Pemasaran BP Migas Djoko Harsono memastikan, kebutuhan gas pada bulan Mei 2005 untuk PIM akan terpenuhi dari Lapangan Gas Arun. Hal itu karena pemerintah sudah mengizinkan Pertamina membeli satu kargo LNG di pasar spot untuk memenuhi kontrak dengan pembeli di Jepang. Kontrak pembelian gas BP Migas menandatangani kesepakatan penjualan gas bumi sebanyak 500 triliun british thermal unit (BTU) dengan nilai kontrak sebesar 1,4 triliun dollar AS.

Kesepakatan yang ditandatangani terdiri atas tiga perjanjian jual beli gas (sale and purchase agreement/GSPA) dan satu nota kesepahaman (MoU). GSPA ditandatangani antara Petronas Carigali Muriah Ltd (PCML) dan PT PLN sebanyak 145 triliun BTU per hari yang akan digunakan untuk mendukung bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Tambak Lorok di Jawa Tengah selama 10 tahun. Selain itu, antara Kalila (Bentu) Operator Pty Ltd dan PT PLN Persero sebanyak 15 triliun BTU per hari yang akan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit PLN di Pekanbaru selama 15 tahun. Kemudian antara Petro China International (Bermuda) Ltd dengan Henrison Iriana sebanyak 1,2 triliun BTU per hari untuk industri kayu lapis di Papua selama lima tahun. Sedangkan MoU yang ditandatangani antara JOB Pertamina Amerada Hess Jambi Merang dan PT PGN. Gas alam yang akan dibeli oleh PGN akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi industri di Sumatera bagian

Selatan. (BOY)